



SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA



# Strategi Nasional Percepatan Pencegahan *Stunting* 2018-2024

---

**Elan Satriawan**

Koordinator Pokja Kebijakan

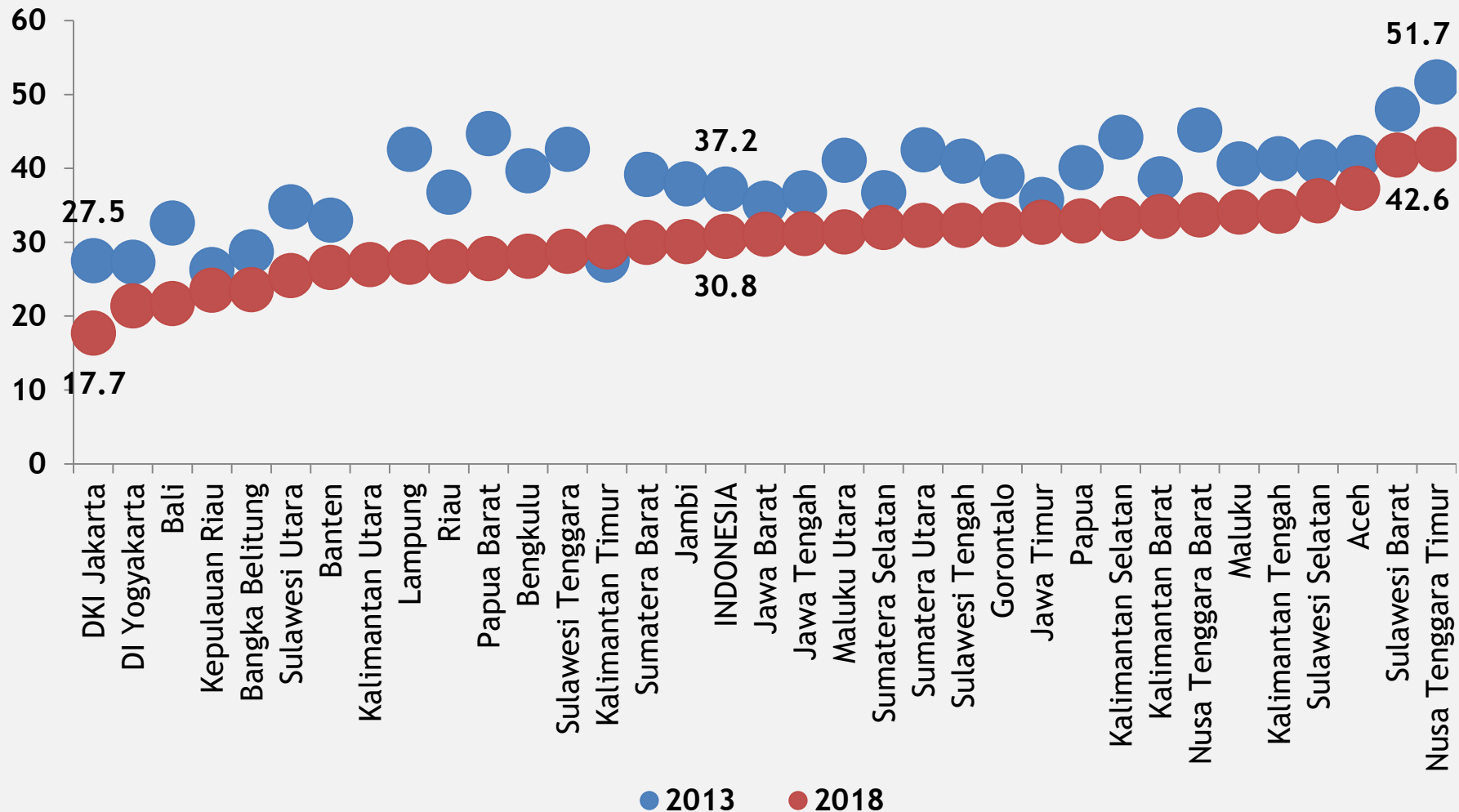
Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K)  
Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia

Jakarta, 22 November 2018

# Hasil Utama Riskedas 2018 Terkait Status Gizi Balita/Baduta

- Prevalensi Balita stunting turun dari 37,2% pada tahun 2013 menjadi 30.8% pada tahun 2018. Prevalensi Baduta stunting juga mengalami penurunan dari 32.8% pada tahun 2013 menjadi 29,9% pada tahun 2018.
- Prevalensi Balita Gizi Buruk/Gizi Kurang dan Kurus/Sangat Kurus juga cenderung mengalami penurunan pada 2013-2018.
- Namun demikian tantangan percepatan penurunan stunting masih cukup besar:
  - Proporsi Berat Badan Lahir Rendah (< 2500 gram /BBLR) mengalami kenaikan tipis dari 5,7% pada tahun 2013 menjadi 6.2% pada tahun 2018
  - Panjang badan lahir kurang dari 48 cm mengalami kenaikan dari 20,2% pada 2013 menjadi 22,7% di 2018.
  - Proporsi Imunisasi Dasar Lengkap pada anak usia 12 - 23 bulan mengalami penurunan dari 59,2% pada tahun 2013 menjadi 57,9% di 2018. Sedangkan proporsi anak yang tidak imunisasi meningkat dari 8,7% pada tahun 2013 menjadi 9,2% pada tahun 2018.
- Percepatan penurunan stunting ke depan antara lain dapat dilakukan dengan mengatasi masalah berikut:
  - Ibu hamil dan Balita yang belum mendapatkan Program Makanan Tambahan (PMT) masih cukup tinggi -masing-masing sekitar 74,8% dan 59%.
  - Proporsi anemia pada Ibu Hamil mengalami kenaikan dari 37.1% pada tahun 2013 menjadi 48.9% pada tahun 2018

# Prevalensi Balita Kerdil (Stunting) 2013-2018



Sumber: Riskesdas 2013-2018, Diolah Balitbangkes

## Kerangka Kebijakan

**UU No. 36/2009**  
tentang Kesehatan



**UU No. 18/2012**  
tentang Pangan



- Indonesia bergabung dalam Gerakan *Global Scaling Up Nutrition (SUN) movement* pada tahun 2011
- Peraturan Presiden No. 42/2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Gernas PPG)
- Pencegahan *stunting* tercakup dalam RPJMN 2015-2019

## Kendala Penyelenggaraan Percepatan Pencegahan *Stunting*

- 1 | Belum efektifnya program-program pencegahan *stunting*.
- 2 | Belum optimalnya koordinasi penyelenggaraan intervensi gizi spesifik dan sensitif di semua tingkatan- terkait dengan perencanaan dan penganggaran, penyelenggaraan, dan pemantauan dan evaluasi.
- 3 | Belum efektif dan efisiennya pengalokasian dan pemanfaatan sumber daya dan sumber dana.
- 4 | Keterbatasan kapasitas dan kualitas penyelenggaraan program.
- 5 | Masih minimnya advokasi, kampanye, dan diseminasi terkait *stunting*, dan berbagai upaya pencegahannya.

# Komitmen Presiden dan Wakil Presiden



12 Juli  
2017

Wakil Presiden memimpin Rapat Koordinasi Tingkat Menteri (Ratas) dan memutuskan bahwa pencegahan *stunting* pending dilakukan dengan pendekatan multi-sektor melalui konvergensi program di semua tingkatan.



9  
Agustus  
2017

Wakil Presiden memimpin Ratas yang menetapkan  
**5 Pilar Pencegahan *Stunting*:**

1. Komitmen dan Visi Kepemimpinan;
2. Kampanye Nasional dan Komunikasi Perubahan Perilaku;
3. Konvergensi, Koordinasi, dan Konsolidasi Program Pusat, Daerah, dan Desa;
4. Ketahanan Pangan dan Gizi
5. Pemantauan dan Evaluasi.



5  
April  
2018

Rapat terbatas tentang pencegahan *stunting* (kerdil) yang dipimpin oleh Presiden

## Pentingnya Stranas *Stunting*

- 1 | Stranas *Stunting* disusun berdasarkan bukti-bukti dan pengalaman Indonesia dan global terkait dengan upaya pencegahan *stunting*.
- 2 | Stranas *Stunting* bertujuan untuk memastikan agar semua sumber daya diarahkan dan dialokasikan untuk mendukung dan membiayai kegiatan-kegiatan prioritas, terutama meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan gizi pada rumah tangga 1.000 HPK (ibu hamil dan anak usia 0-2 tahun).
- 3 | Stranas *Stunting* disusun agar semua pihak di semua tingkatan dapat bekerja sama untuk mempercepat pencegahan *stunting*.
- 4 | Penyusunan Stranas *Stunting* melibatkan: K/L, akademisi dan organisasi profesi, masyarakat madani, dunia usaha, dan mitra pembangunan/donor.

# 23 Kementerian/Lembaga Berkolaborasi untuk Percepatan Pencegahan *Stunting*



SEKRETARIAT KABINET  
REPUBLIK INDONESIA





# Strategi Nasional Percepatan Pencegahan *Stunting*

---

# Prioritas



## Sasaran Prioritas

Ibu hamil dan anak usia 0-2 tahun atau rumah tangga 1.000 HPK



## Intervensi Prioritas

- Intervensi Gizi Spesifik
- Intervensi Gizi Sensitif



## Kabupaten/ Kota Prioritas

2018 → 1.000 desa fokus di 100 Kab/Kota prioritas  
2019 → 1.600 desa fokus di 160 Kab/Kota prioritas  
2020-2024: semua desa di semua Kab/Kota prioritas secara bertahap

# Intervensi Gizi Spesifik

Kelompok Sasaran	Intervensi Prioritas	Intervensi Penting	Intervensi Sesuai Kondisi
<b>Intervensi gizi spesifik - Sasaran prioritas</b>			
<b>Ibu hamil</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dari kelompok miskin</li> <li>• Suplementasi tablet tambah darah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Suplementasi kalsium</li> <li>• Pemeriksaan kehamilan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlindungan dari malaria</li> <li>• Pencegahan HIV</li> </ul>
<b>Ibu menyusui dan anak 0-23 bulan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Promosi dan konseling menyusui</li> <li>• Promosi dan konseling pemberian makan bayi dan anak (PMBA)</li> <li>• Tata laksana gizi buruk akut</li> <li>• Pemberian makanan tambahan pemulihan bagi anak gizi kurang akut</li> <li>• Pemantauan pertumbuhan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Suplementasi kapsul vitamin A</li> <li>• Suplementasi taburia</li> <li>• Imunisasi</li> <li>• Suplementasi zinc untuk pengobatan diare</li> <li>• Manajemen terpadu balita sakit (MTBS)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pencegahan kecacingan</li> </ul>
<b>Intervensi gizi spesifik - Sasaran Penting</b>			
<b>Remaja dan wanita usia subur</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Suplementasi tablet tambah darah</li> </ul>		
<b>Anak 24-59 bulan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tata laksana gizi buruk akut</li> <li>• Pemberian makanan tambahan pemulihan bagi anak gizi kurang akut</li> <li>• Pemantauan pertumbuhan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Suplementasi kapsul vitamin A</li> <li>• Suplementasi taburia</li> <li>• Suplementasi zinc untuk pengobatan diare</li> <li>• Manajemen terpadu balita sakit (MTBS)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pencegahan kecacingan</li> </ul>

# Intervensi Gizi Sensitif

Jenis Intervensi	Program/Kegiatan Intervensi
Peningkatan penyediaan air minum dan sanitasi	<ul style="list-style-type: none"><li>• Akses air minum yang aman</li><li>• Akses sanitasi yang layak</li></ul>
Peningkatan akses dan kualitas pelayanan gizi dan kesehatan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Akses pelayanan Keluarga Berencana (KB)</li><li>• Akses Jaminan Kesehatan (JKN)</li><li>• Akses bantuan uang tunai untuk keluarga kurang mampu (PKH)</li></ul>
Peningkatan kesadaran, komitmen, dan praktik pengasuhan dan gizi ibu dan anak	<ul style="list-style-type: none"><li>• Penyebarluasan informasi melalui berbagai media</li><li>• Penyediaan konseling perubahan perilaku antar pribadi</li><li>• Penyediaan konseling pengasuhan untuk orang tua</li><li>• Akses Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan pemantauan tumbuh-kembang anak</li><li>• Penyediaan konseling kesehatan dan reproduksi untuk remaja</li><li>• Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak</li></ul>
Peningkatan akses pangan bergizi	<ul style="list-style-type: none"><li>• Akses bantuan pangan non tunai (BPNT) untuk keluarga kurang mampu</li><li>• Akses fortifikasi bahan pangan utama (garam, tepung terigu, minyak goreng)</li><li>• Akses kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)</li><li>• Penguatan regulasi mengenai label dan iklan pangan</li></ul>

# Komitmen dan Visi Kepemimpinan

---

# Situasi Nasional dan Pengalaman Internasional

## SITUASI NASIONAL

- Perpres No. 42/2013 memberikan mandat kepada Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) untuk memimpin percepatan perbaikan gizi.
- Kementerian/Lembaga yang relevan dengan upaya pencegahan *stunting* tidak berada dibawah koordinasi Menko Kesra.

## PENGALAMAN INTERNASIONAL

- Pengalaman baik internasional menunjukkan pentingnya kepemimpinan tingkat tinggi untuk menurunkan prevalensi *stunting*.
- **Peru and Brazil**: Komitmen dan kepemimpinan Presiden untuk memprioritaskan upaya peningkatan gizi dan akses terhadap layanan kesehatan.
- **Peru**: Prevalensi *stunting* turun dari 28,5 persen (2007) ke 14,4 persen (2015)
- **Brazil**: Dalam 30 tahun, prevalensi *stunting* menurun dari 37 persen ke 7 persen.

## ..... TUJUAN .....

Memastikan pencegahan *stunting* menjadi prioritas pemerintah dan masyarakat di semua tingkatan.

## ..... STRATEGI .....

1. **Kepemimpinan Presiden/Wakil Presiden untuk pencegahan *stunting***; dengan memastikan bahwa visi, arahan, dan dukungan Presiden dan Wakil Presiden tersosialisasi dengan baik dan diterjemahkan ke dalam kebijakan dan distribusi sumber daya yang tepat sasaran dan memadai di semua tingkatan..
2. **Kepemimpinan Pemerintah Daerah untuk pencegahan *stunting***; dengan menciptakan lingkungan kebijakan yang mendukung bagi penyelenggaraan kegiatan konvergensi pencegahan *stunting* berbasis hasil.
3. **Kepemimpinan Pemerintah Desa untuk pencegahan *stunting***; dengan menciptakan lingkungan kebijakan yang mendukung bagi penyelenggaraan pencegahan *stunting* secara konvergen di tingkat desa.
4. **Pelibatan swasta, masyarakat madani, dan komunitas**; dengan memastikan keterlibatan mereka secara aktif dalam percepatan pencegahan *stunting* di masyarakat.

## ..... KOORDINATOR .....

Pilar ini dikoordinasikan oleh Sekretariat Wakil Presiden/TNP2K

# Struktur Koordinasi



## Komite Pengarah

*Ketua:* Wakil Presiden

*Wakil Ketua:* Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK)



## Komite Pengendali

*Ketua:* Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan, Sekretariat Wakil Presiden, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesehatan, Kemenko PMK, dan Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan, Bappenas.

*Anggota:* Eselon 1 dari K/L terkait.



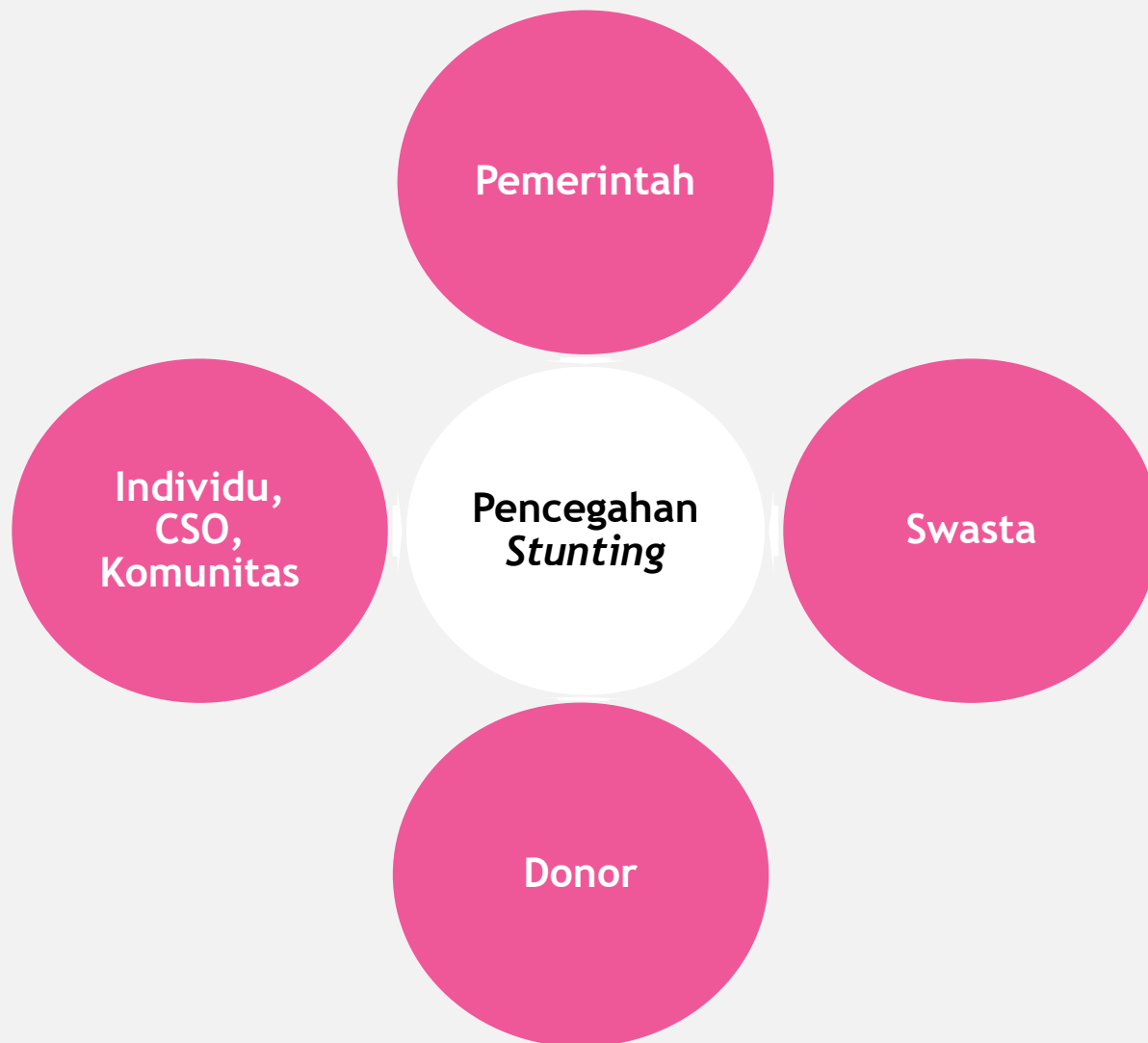
## Tim Teknis

*Ketua:* Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Bappenas, Direktur Gizi Masyarakat, Kemenkes, dan Direktur SUPD III, Kemendagri

*Anggota:* Eselon 2 dari K/L terkait.



# Sinergi Sumberdaya Untuk Percepatan Pencegahan Stunting



**Sumberdaya pemerintah dengan peningkatan efektivitas dan efisiensi**



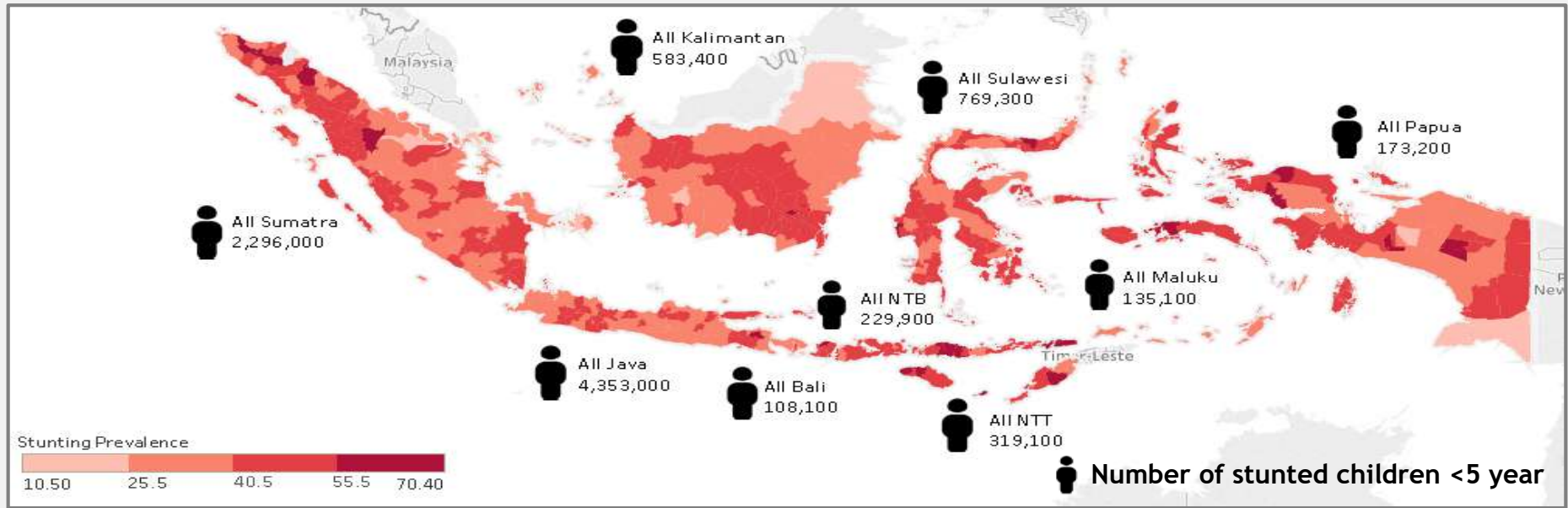
**Optimalisasi peran dan mobilisasi sumberdaya swasta, donor, masyarakat madani, individu dan kelompok masyarakat**

# Kampanye Nasional dan Komunikasi Perubahan Perilaku

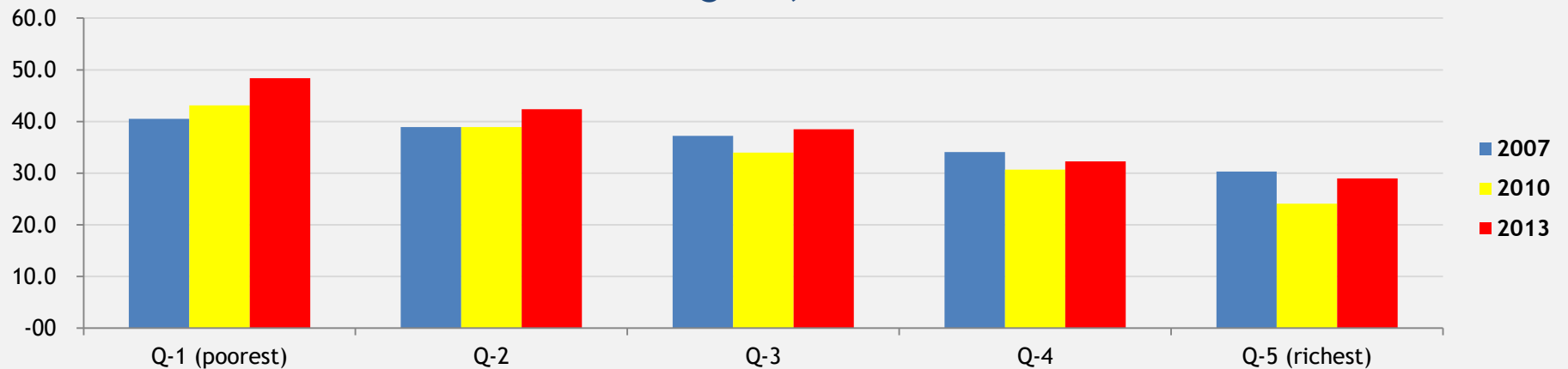
---

# Around 37% (9 Million) Children are Stunting

## Stunting occur in all region and across income groups



### Stunting U-5, Indonesia



Source: RISKESDAS (prevalence of stunting) and BPS

# Situasi Nasional dan Pengalaman Internasional

## SITUASI NASIONAL

- Keterbatasan kampanye, advokasi dan diseminasi tentang *stunting* serta upaya-upaya pencegahannya.
- Kampanye nasional yang sistematis, termasuk komunikasi perubahan perilaku dalam pencegahan *stunting* masih perlu dikembangkan.

## PENGALAMAN INTERNASIONAL

- Pengalaman baik internasional menunjukkan pentingnya kampanye nasional untuk mendorong kesadaran publik tentang *stunting*.
- **Peru**: Kampanye media massa dan advokasi publik.
- **Vietnam**: Kampanye kesadaran publik untuk mempromosikan pesan-pesan kunci.
- **India and Bangladesh**: Mempromosikan komunikasi perubahan perilaku di tingkat komunitas.

## ..... TUJUAN .....

Meningkatkan kesadaran publik dan perubahan perilaku masyarakat untuk mencegah *stunting*.

## ..... STRATEGI .....

1. **Kampanye perubahan perilaku bagi masyarakat umum yang konsisten dan berkelanjutan;** dengan memastikan pengembangan pesan, pemilihan saluran komunikasi, dan pengukuran dampak yang efektif, efisien, tepat sasaran, dan berkelanjutan.
2. **Komunikasi antar pribadi sesuai konteks sasaran;** dengan memastikan pengembangan pesan sesuai kebutuhan kelompok sasaran.
3. **Advokasi berkelanjutan kepada pengambil kebutuhan;** dengan memastikan terselenggaranya penjangkauan yang sistematis.
4. **Pengembangan kapasitas penyelenggara;** dengan memberikan pengetahuan dan pelatihan bagi penyelenggara kampanye dan komunikasi perubahan perilaku yang efektif dan efisien.

## ..... KOORDINATOR .....

Pilar ini dikoordinasikan oleh Menteri Kesehatan dan Menteri Komunikasi dan Informasi.

# Konvergensi, Koordinasi, dan Konsolidasi Program Pusat, Daerah, dan Desa

---

# Situasi Nasional dan Pengalaman Internasional

## SITUASI NASIONAL

- Belum optimalnya koordinasi penyelenggaraan intervensi gizi spesifik dan sensitif di semua tingkatan- terkait dengan perencanaan dan penganggaran, penyelenggaraan, dan pemantauan dan evaluasi.

## PENGALAMAN INTERNASIONAL

- Pengalaman baik internasional menunjukkan konvergensi program lintas sektor efektif untuk percepatan penurunan *stunting*.
- **Peru**: Penganggaran berbasis hasil yang terfokus pada 1000 HPK, seleksi prioritas anggaran.
- **Bangladesh**: Intervensi lintas sektor untuk mengatasi masalah *stunting*.
- **Brazil**: Intervensi lintas sektor untuk meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan bagi perempuan hamil dan anak-anak.

## ..... TUJUAN .....

Memperkuat konvergensi melalui koordinasi dan konsolidasi program dan kegiatan pusat, daerah, dan desa.

## ..... STRATEGI .....

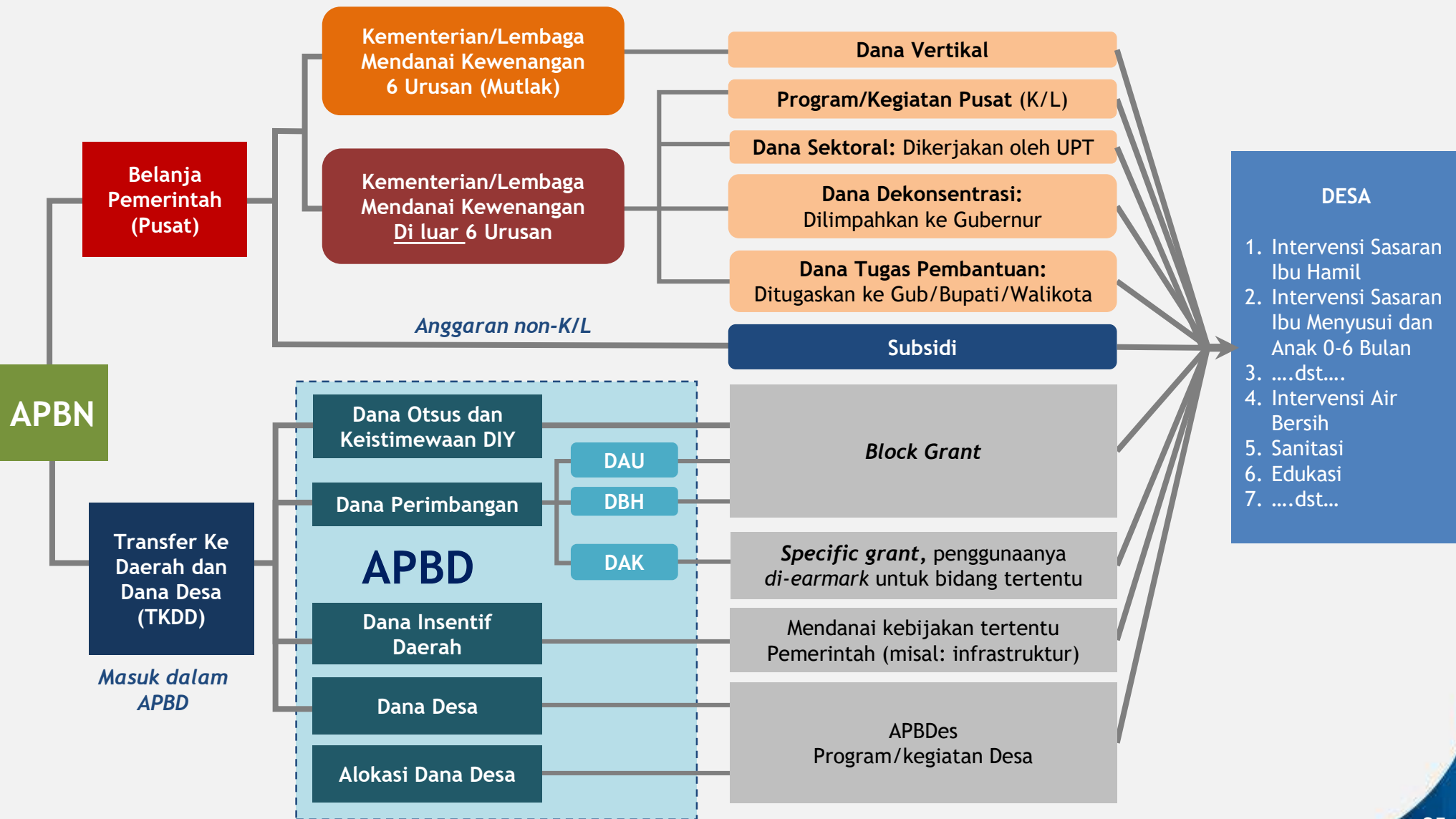
1. **Memperkuat konvergensi dalam perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan;** untuk meningkatkan cakupan dan kualitas intervensi gizi prioritas melalui pengembangan kapasitas pemerintah kabupaten/kota.
2. **Memperbaiki disain dan pengelolaan program;** untuk memastikan sasaran prioritas (rumah tangga 1.000 HPK) memperoleh dan memanfaatkan paket intervensi yang disediakan.
3. **Memperkuat koordinasi lintas sektor dan antar tingkatan pemerintah sampai desa;** untuk memastikan keselarasan penyediaan dan penyelenggaraan pelaksanaan program.

## ..... KOORDINATOR .....

Pilar ini dikoordinasikan oleh Menteri Bappenas dan Menteri Dalam Negeri.



# Sumber Pembiayaan Pemerintah untuk Pencegahan *Stunting*



# Ketahanan Pangan dan Gizi

---

# Situasi Nasional dan Pengalaman Internasional

## SITUASI NASIONAL

- Keterbatasan akses kelompok miskin terhadap pangan bergizi.
- Keterbatasan regulasi mengenai pelabelan dan iklan pangan.
- Keterbatasan cakupan intervensi fortifikasi pangan.
- Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang menyediakan beras dan telur bagi keluarga miskin.

## PENGALAMAN INTERNASIONAL

- Pengalaman baik internasional memperlihatkan pentingnya ketahanan pangan bergizi, termasuk kontrol label makanan, iklan pangan, dan fortifikasi pangan.
- **India:** Memperluas intervensi fortifikasi pangan untuk meningkatkan kualitas diet.
- **Mexico:** Bantuan tunai untuk membeli pangan bergizi selama masa kehamilan, menyusui, dan tahap pemberian makanan tambahan.
- **Vietnam:** Pelarangan iklan pengganti susu pengganti ASI yang berpengaruh terhadap promosi pemberian ASI eksklusif.

## ..... TUJUAN .....

Meningkatkan akses terhadap makanan bergizi dan mendorong ketahanan pangan.

## ..... STRATEGI .....

1. **Akses pangan yang bergizi;** dengan memastikan keterjangkauan dan ketersediaan pangan bergizi, dan mendorong cakupan dan kualitas program fortifikasi pangan utama yang sudah berjalan (garam, tepung terigu, minyak goreng).
2. **Perluasan program bantuan sosial dan bantuan pangan non tunai yang bergizi untuk keluarga kurang mampu;** agar dapat memenuhi kebutuhan gizi sasaran prioritas dari keluarga kurang mampu.
3. **Pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi keluarga;** dengan mempercepat diversifikasi pangan berbasis sumber daya pangan lokal dan pengembangan Kawasan Ramah Pangan Lestari (KRPL) berkelanjutan.
4. **Penguatan regulasi mengenai label dan iklan pangan;** dengan memperkuat koordinasi kelembagaan, penegakan hukum, dan mekanisme pelabelan dan penyampaian iklan pangan untuk memastikan keamanan dan mutu pangan.

## ..... KOORDINATOR .....

Pilar ini dikoordinasikan oleh Menteri Pertanian dan Menteri Kesehatan.

# Pemantauan dan Evaluasi

---

## ..... TUJUAN .....

Meningkatkan pemantauan dan evaluasi sebagai dasar untuk memastikan pemberian layanan yang bermutu, peningkatan akuntabilitas, dan percepatan pembelajaran.

## ..... STRATEGI .....

1. **Peningkatan sistem pendataan;** yang dapat memantau secara akurat dan berkala data prevalensi *stunting* di tingkat nasional dan kabupaten/kota.
2. **Penggunaan data dalam perencanaan dan penganggaran berbasis hasil;** data harus mudah diakses, dipahami, dan digunakan pemerintah pusat dan daerah dalam menyusun perencanaan dan penganggaran berbasis hasil pada tahun anggaran berikutnya.
3. **Percepatan siklus pembelajaran;** dengan meningkatkan mekanisme berbagi pengetahuan, pembelajaran, dan inovasi.

## ..... KOORDINATOR .....

Pilar ini dikoordinasikan oleh Sekretariat Wakil Presiden/TNP2K dan Bappenas



# Terima Kasih

---